NEWSLETTER

DESEMBER 2023

FORCLIME
Forests and Climate Change Programme

TINJAUAN BERKALA
Cagar Biosfer Lore Lindu

ARTIKEL LAINNYA

FORCLIME PRESENTASIKAN HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN untuk pengelolaan hutan di Papua

POKJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA susun rencana kerja tahun 2024

Editorial

FORCLIME Newsletter edisi bulan Desember 2023 ini menyoroti kegiatan FORCLIME dalam mendukung penyusunan dokumen *Periodical Review* (peninjauan berkala) yang ditetapkan oleh Program Manusia dan Biosfer UNESCO (UNESCO's Man and Biosphere Programme – MAB UNESCO) untuk memastikan cagar biosfer dapat berfungsi sesuai penetapannya. Peninjauan ini secara berkala dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dan untuk Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL), peninjauan berkala dijadwalkan tahun 2023.

Peninjauan berkala cagar biosfer bukan hanya sekedar kegiatan birokrasi, namun merupakan mekanisme penting untuk memastikan kegiatan keberlangsungan efektivitas pengelolaan kawasan tersebut. Dengan melakukan penilaian rutin, kita dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi, memantau keanekaragaman hayati, menilai dampak terhadap manusia, mengevaluasi program pendidikan dan penelitian. Dengan melakukan tinjauan berkala CBLL, dapat memperkuat komitmen untuk melestarikan kekayaan kehidupan dan memupuk masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, terutama di Sulawesi Tengah.

Hingga saat ini, ada 19 cagar biosfer di Indonesia yang menjadi bagian dari World Network of Biosphere Reserves (WNBR) dengan luas 29.901.729,259 ha, yang meliputi kawasan zona inti berupa kawasan konservasi seluas 5.362.516,74 Ha, zona penyangga seluas 7.618.547, 845 Ha dan zona transisi seluas 16.875.935, 375 Ha*. Jaringan Cagar Biosfer Dunia (WNBR) saat ini terdiri dari 738 lokasi di 134 negara termasuk 22 situs *transboundary*.

Dalam edisi bulan ini, juga ditampilkan berita-berita kegiatan FORCLIME mengenai hasil *training needs assessment* (TNA) di Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua, serta Rakor Pokja Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat Daya,

Ismet Khaeruddin
Advisor Senior bidang konservasi sumber daya hutan dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

*Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/512136/kelembagaan-mab-unesco-indonesia-brin-sudah-kembangkan-19-cagar-biosfer)

Atas: Megalit Pokekea-Taman Nasional Lore Lindu. Foto oleh: Angga (NGI)

Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu

Pengalaman dan pembelajaran FORCLIME mendukung upaya mempertahankan masa depan Cagar Biosfer Lore Lindu

Ismet Khaeruddin, Advisor Senior bidang konservasi sumber daya hutan dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Muhammad Yusuf, Junior Advisor bidang Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Arif Hidayat, Junior Advisor bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati

Apa itu Cagar Biosfer?

Suatu kawasan ekosistem daratan, pesisir, perarian laut dan/atau pulau kecil yang diakui oleh Program MAB – UNESCO untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam dengan dukungan sains. MAB UNESCO adalah Program Ilmiah Antar Pemerintah yang menggabungkan ilmu sains tentang alam, sosial, ekonomi dan pendidikan untuk meningkatkan penghidupan manusia dan melindungi ekosistem alam serta ekosistem buatan yang dikelola, dengan demikian mendorong pendekatan inovatif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, selaras alam. Cagar biosfer melayani perpaduan tiga fungsi yaitu:

1. Kontribusi konservasi lansekap, ekosistem, jenis, plasma nutfah.
2. Menyuburkan pembangunan ekonomi berkelanjutan baik secara ekologi maupun budaya
3. Mendukung logistik untuk penelitian, pemantauan, Pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan

Konsep cagar biosfer diprakarsai oleh Gugus Tugas UNESCO dalam Program Manusia dan Biosfer (MAB) tahun 1971, disusul peluncuran Jaringan Cagar Biosfer Dunia tahun 1976. Pada Juni 2023 anggota Jaringan ini telah berkembang menjadi 748 situs di 134 negara, termasuk 23 situs lintas negara. Jaringan ini merupakan komponen kunci dalam tujuan MAB untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara melestarikan keanekaragaman hayati, mempromosikan pembangunan ekonomi dan pemeliharaan nilai-nilai budaya. Cagar biosfer adalah situs di mana tujuan ini diuji, disempurnakan, didemonstrasikan dan diimplementasikan.

Secara fisik, setiap cagar biosfer harus mengandung tiga elemen:

- **Satu atau lebih zona inti**, yang merupakan situs yang dilindungi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, memantau ekosistem yang tergan ggu, dan melakukan penelitian non-destruktif dan pemanfaatan berdampak rendah lainnya, seperti pendidikan;
- **Zona penyangga** yang diidentifikasi dengan jelas, yang biasanya mengelilingi atau berdekatan dengan zona inti, dan digunakan untuk kegiatan kerja sama yang kompatibel dengan praktik ekologi yang sehat, termasuk pendidikan lingkungan, rekreasi, ekowisata, dan penelitian dasar dan terapan; dan
- **Zona transisi** yang fleksibel, atau area kerja sama, yang mungkin berisi berbagai kegiatan pertanian, pemukiman dan penggunaan lainnya dan dimana masyarakat lokal, lembaga manajemen, ilmuwan, organisasi non-pemerintah, kelompok budaya, kepentingan ekonomi dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya daerah secara berkelanjutan.

Meskipun awalnya dibayangkan sebagai serangkaian cincin konsentris, ketiga zona tersebut telah diimplementasikan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi lokal. Bahkan, salah satu kekuatan terbesar dari konsep cagar biosfer adalah fleksibilitas dan kreativitas yang telah diwujudkan dalam berbagai situasi.

Cagar biosfer dirancang untuk menangani salah satu pertanyaan paling penting yang dihadapi dunia hari ini: Bagaimana kita bisa berdamai dengan konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan sumber daya biologi secara berkelanjutan? Sebuah cagar biosfer yang efektif melibatkan ilmuwan alam dan ilmuwan sosial; Kelompok konservasi dan kelompok pengembangan; Otoritas manajemen dan komunitas lokal - semuanya bekerja sama dalam masalah kompleks ini.

Cagar Biosfer Lore Lindu merupakan salah satu cagar biosfer generasi pertama Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1977, terletak di lansekap jantung Pulau Sulawesi. Lansekap ini merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk keanekaragaman hayati, layanan ekosistem, kebudayaan serta peradaban manusia yang telah berusia lebih dari 3000 tahun yang ditandai oleh lebih dari 2000 situs dan artifak megalit. Lansekap ini kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu pada 23 Juni 1999 dengan luas 217.991,18 hektare, yang merupakan penggabungan dari tiga kawasan, yaitu Suaka Margasatwa Lore Kalamanta (ditetapkan 1973), Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu (ditetapkan 1978), dan Suaka Margasatwa Lore Lindu (ditetapkan 1981).

Lansekap ini merupakan rumah bagi 30 mamalia endemik Sulawesi, termasuk anoa dataran rendah dan pegunungan (*Bubalus depressicornis & B. quarlesi*), babirusa (*Babyrousa babirusa*), babi hutan sulawesi (*Sus celebensis*), monyet boti (*Macaca tongkeana*), musang raksasa (Giant Civet, *Macrogalidia muschenbroecki*), dan dua spesies tarsius (*Tarsius dianae* dan *Tarsius pumilus*), serta 225 jenis burung, diantaranya 78 jenis endemik dan sekitar 46 jenis yang penyebarannya terbatas, seperti malleolus (*Macrocephalon maleo*), rangkong sulawesi (*Rhyticeros cassidix*), rangkong kerdil sulawesi (*Penelopides exarhatus*) dan elang sulawesi (*Spizaetus lanceolatus*).

Olehnya kawasan ini mendapat pengakuan sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati oleh IUCN, Kawasan Burung Endemik oleh Birdlife International, dan Ekoregion Global 200 oleh WWF. Keseluruhan kawasan ini kemudian menjadi zona inti Cagar Biosfer Lore Lindu pada tahun 2011 sebagai implementasi dari Tujuan IV.1 dari Strategi Seville (ICC MAB UNESCO 20 – 25 Maret 1995): Mengintegrasikan Fungsi Cagar Biosfer. Poin 10. Mengidentifikasi dan memetakan zonasi cagar biosfer dan menetapkan status dari setiap zona. Poin 11. Menyiapkan, mengimplementasikan dan memonitor rencana pengelolaan atau kebijakan yang memasukan semua zonasi cagar biosfer. Dan, Poin 12. Jika diperlukan, untuk tujuan mereservasi zona inti, bisa merencanakan ulang zona penyangga dan zona transisi sesuai kriteria pembangunan berkelanjutan.

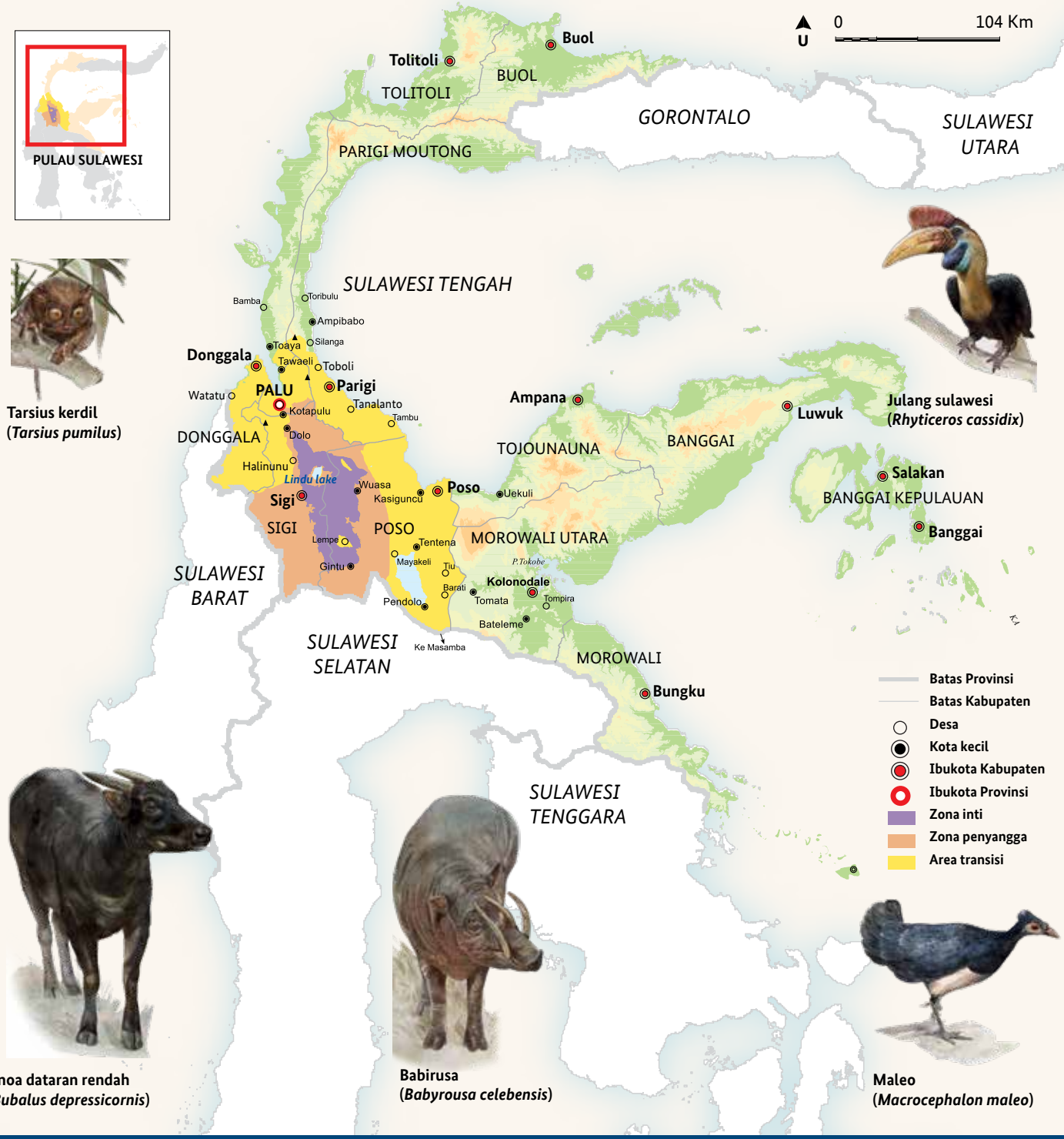

Untuk memastikan kesesuaian fungsi dan kemanfaatan dari penetapan cagar biosfer, Program MAB UNESCO mengharuskan dilakukan peninjauan berkala 10 tahunan terhadap setiap cagar biosfer anggota Jaringan Cagar Biosfer Dunia, sebagaimana dimandatkan dalam Seville Strategy dan Rencana Aksi Madrid (Madrid Action Plan-MAP). Hal ini harus dilakukan agar upaya konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan dukungan logistik ilmu pengetahuan (penelitian, pelatihan dan pemantauan) dapat berjalan seimbang. Dengan demikian, perlu dilakukan langkah untuk mempersiapkan tinjauan berkala untuk Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL), karena yang terpenting adalah adanya kewajiban melaporkan keadaan CBLL setiap 10 tahun. Namun ada perubahan pada *guideline* tinjauan berkala tahun 2013 dari *guideline* sebelumnya. Juga, kegiatan ini menilai apakah CBLL memenuhi tujuan utama cagar biosfer, sebagaimana pada Pasal 4 *Statutory Framework*.

FORCLIME memahami pentingnya tinjauan berkala untuk CBLL. Karena itu komunikasi dan koordinasi efektif antar pemangku kepentingan CBLL diperlukan. Lebih lagi Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelola Cagar Biosfer Lore Lindu (Forum CBLL) sebagai organisasi yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat harus terlibat aktif agar proses tinjauan berkala dapat berlangsung baik, sehingga hasil yang dituangkan dalam laporan dapat diterima dan disetujui oleh semua pihak. Dokumen Tinjauan Berkala ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Untuk memastikan kesesuaian fungsi dan kemanfaatan dari penetapan cagar biosfer, Program MAB UNESCO mengharuskan dilakukan peninjauan berkala 10 tahunan terhadap setiap cagar biosfer anggota Jaringan Cagar Biosfer Dunia.

Dalam pelaksanaannya, Tinjauan Berkala CBLL disusun mengikuti format dari Program Man and Biosphere (MAB) UNESCO. Memperhatikan kompleksitas format yang digunakan yang membutuhkan data dan kemampuan membaca dan menjelaskan data informasi secara terstruktur, komprehensif tapi ringkas (*concise*). Setelah melakukan beberapa proses konsultasi dengan anggota Forum yang difasilitasi bersama Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan FORCLIME, untuk melakukan *tagging* kegiatan dan *budget* yang bersesuaian yang telah direncanakan dan diimplementasikan dinas terkait di area CBLL dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Tapi data tersedia dari Bappeda dan dinas terkait hanya untuk tiga sampai lima tahun terakhir. Untuk membantu melanjutkan proses penggalian, pengumpulan, sintesa dan dokumentasi data dan informasi, serta menyiapkan draf laporan dalam dua bahasa,

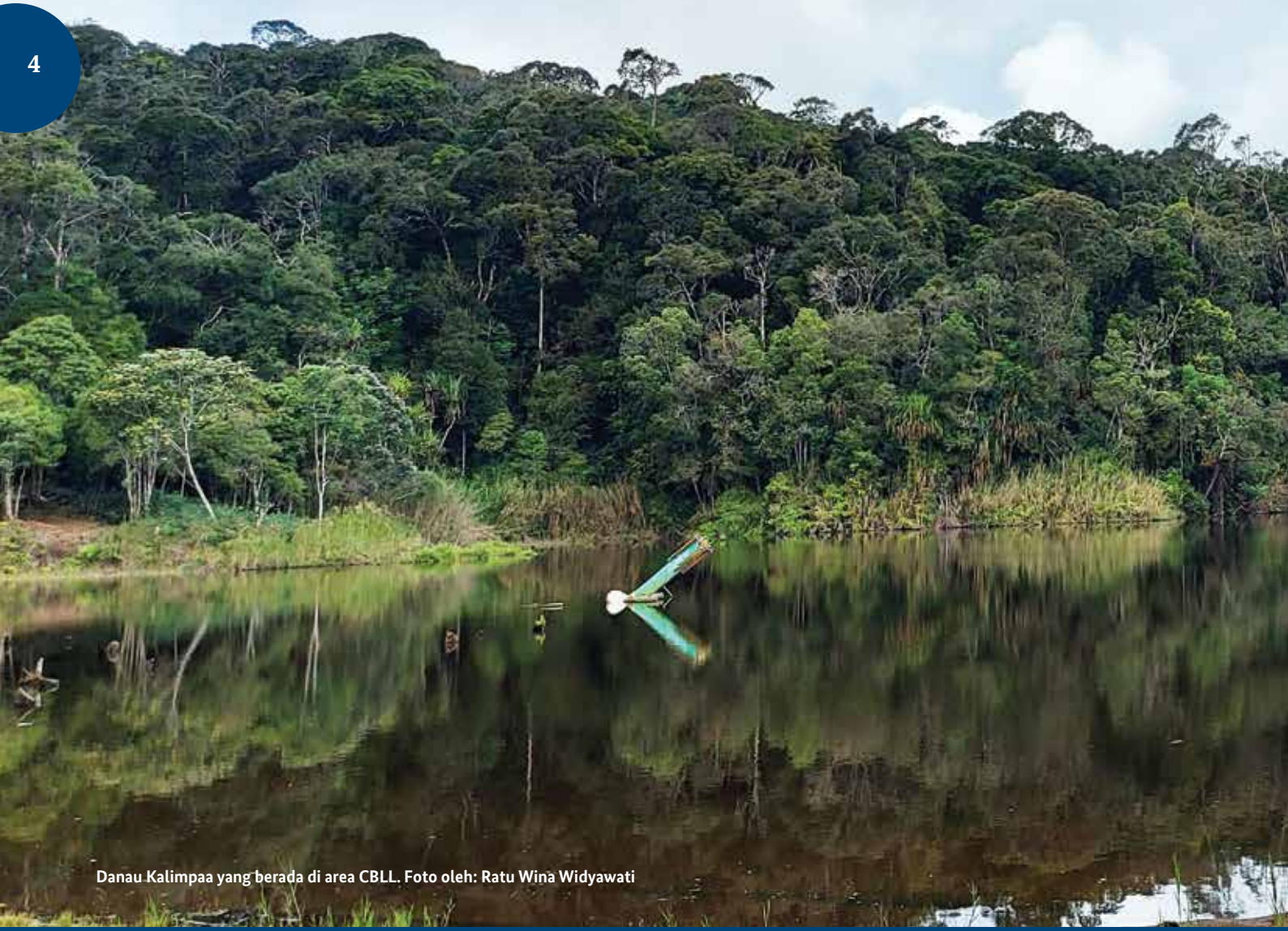

Danau Kalimpaa yang berada di area CBLL. Foto oleh: Ratu Wina Widyawati

Indonesai dan Inggris, serta menfasilitasi konsultasi kepada anggota Forum CBLL, seorang konsultan independen dikontrak.

Diskusi-diskusi di kantor FORCLIME dalam dua pekan pertama konsultansi, serta penelusuran dokumen perencanaan dan laporan implementasi kegiatan dinas-dinas terkait dan lembaga lain, seperti Forest Program III Sulawesi, yang mengindikasikan praktik pembangunan berkelanjutan di area CBLL dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, telah memberikan arah dan penguatan konten kepada konsultan untuk menghasilkan draf 1 laporan tinjauan berkala. Berbekal informasi dan draf 1 laporan tinjauan berkala, konsultan dengan didampingi rekan FORCLIME melakukan kunjungan konsultasi kepada instansi anggota Forum, serta proyek kerja sama dan lembaga non-pemerintah, untuk konfirmasi dan pengkayaan data dan sintesa di laporan draf 1. Revisi kemudian dilakukan untuk menghasilkan laporan draf 2. Laporan draf 2 kemudian dibawa ke pertemuan Forum yang dihadiri hampir seluruh anggota Forum CBLL. Dua pertemuan forum besar, karena dihadiri oleh hampir seluruh anggota forum telah dilakukan sebanyak dua kali pada September dan Oktober 2023, guna memberi masukan dan perbaikan pada laporan draf 2 dan draf 3 yang disiapkan konsultan. Penyampaian draf laporan ini kepada sebanyak mungkin anggota forum dilakukan untuk memastikan terjadinya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam penyusulan Laporan Tinjauan Berkala ini.

Status laporan tinjauan berkala sampai Desember 2023 adalah draf final. Draf final laporan ini telah disampaikan kepada Bappeda Provinsi dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, sebagai Ketua dan Sekretaris Forum CBLL untuk dikoreksi dan diperkaya, sebelum disampaikan kepada anggota Forum CBLL pada pertemuan forum untuk mendapatkan persetujuan.

Status laporan tinjauan berkala sampai Desember 2023 adalah draf final. Draf final laporan ini telah disampaikan kepada Bappeda Provinsi dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, sebagai Ketua dan Sekretaris Forum CBLL untuk dikoreksi dan diperkaya, sebelum disampaikan kepada anggota Forum CBLL pada pertemuan forum untuk mendapatkan persetujuan. Laporan final Tinjauan Berkala CBLL 2013-2023 kemudian akan difinalisasi dan diserahkan kepada otoritas, Forum CBLL, yang kemudian akan dikirimkan kepada

Komite Nasional Program MAB UNESCO Indonesia, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dicermati dan disetujui. Komite Nasional kemudian mengirimkan laporan itu kepada Sekretariat Program MAB UNESCO di Paris untuk dilakukan penilaian guna memastikan bahwa Cagar Biosfer Lore Lindu masih bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 4 *Statutory Framework*.

Kendala dan Rekomendasi Proses Tinjauan Berkala CBLL

Beberapa kendala utama dalam proses tinjauan berkala ini, termasuk format yang kompleks dan dalam Bahasa Inggris sehingga butuh cukup pengetahuan tentang konsep cagar biosfer, serta kemampuan Bahasa Inggris dan pemahaman yang utuh tentang format. Kompleksitas dari format termasuk diharuskannya proses *meaningful participative* sehingga dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk dapat mengunjungi anggota forum utama, dan mendapatkan waktu yang sama untuk bertemu antar anggota forum yang terdiri dari lebih 40 institusi pemerintah dan non-pemerintah, bisnis/lembaga usaha serta universitas di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, dibutuhkan persiapan yang baik dengan langkah-langkah yang runut, serta kemampuan dokumentasi dan mensintesa data dan informasi yang diperoleh dari diskusi-diskusi bilateral dan dalam kelompok besar, seperti dalam pertemuan Forum Pengelola CBLL. Ketersediaan tenaga atau staf yang mempunyai pemahaman cukup tentang konsep cagar biosfer dan berdedikasi tinggi yang ditugaskan khusus untuk mengawal proses ini menjadi salah satu kunci, mengingat banyaknya para pihak dengan latar belakang dan *interest* berbeda yang dihadapi, disamping banyaknya data dan informasi yang harus direkam dan disintesis.

Oleh karena keterbatasan waktu staf FORCLIME Palu untuk mengawal proses ini, penggunaan jasa konsultan perorangan digunakan. Namun demikian, tidak mudah untuk mendapat konsultan yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang konsep cagar biosfer, dan bagaimana konsep itu dalam tataran praktis atau implementasi kegiatan, sekaligus mempunyai kemampuan menulis laporan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, khususnya di tingkat lokal, Sulawesi Tengah.

Kendala utama lainnya adalah ketersediaan data dan informasi yang bersesuian dari anggota Forum Pengelolaan CBLL untuk durasi waktu yang cukup panjang, sepuluh tahun. Dinamika atau pergantian

Atas: Kegiatan terkait penyusunan dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu. **Bawah:** Danau Tambing dalam area CBLL.

pejabat atas staf dan sistem pengelolaan data yang terkadang kurang terstruktur di institusi anggota Forum berkontribusi kepada ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tinjauan berkala ini. Dinamika personel di institusi anggota forum mensyaratkan proses pemberian pemahaman tentang konsep cagar biosfer dan pentingnya tinjauan berkala ini harus dilakukan berulang untuk kebanyakan institusi anggota Forum. Kebanyakan institusi anggota Forum hanya bisa menyediakan data dan informasi untuk durasi tiga sampai lima tahun.

Oleh karena itu, untuk proses tinjauan berkala berikutnya, baiknya bisa dilakukan bertahap setiap tiga atau lima tahun, yang kemudian bisa disatukan pada proses tinjauan berkala di tahun kesepuluh. Mempertimbangkan proses panjang yang diperlukan untuk merampungkan laporan tinjauan berkala ini, untuk proses tinjauan berkala berikut sebaiknya sudah dimulai di awal tahun kesepuluh. Selain itu, *issue* keamanan data (*data security*) juga menjadi kendala. Oleh karena itu, memastikan kesediaan Bappeda Provinsi atau institusi pemerintah yang bersesuaian sebagai promotor kegiatan tinjauan berkala menjadi pemungkin proses ini mendapat dukungan dari para pihak, sehingga ada kepercayaan untuk melakukan *sharing* data dan informasi.

Pengelolaan cagar biosfer menuntut peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk mensyaratkan partisipasi bermakna dari anggota Forum

Last but not least, ketiadaan regulasi khusus di tingkat nasional, boleh jadi dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, tentang Penetapan dan Pengelolaan Cagar Biosfer, yang memuat peran dan tanggung jawab para pihak dalam pengelolaan cagar biosfer, termasuk pelaksanaan tinjauan berkala, menjadi tantangan terbesar dalam proses fasilitasi dan penyusunan laporan tinjauan berkala ini yang mensyaratkan partisipasi bermakna dan berbagi data dan informasi dari anggota Forum yang terkadang sensitif. Olehnya, dorongan untuk adanya regulasi khusus tentang cagar biosfer di tingkat nasional menjadi suatu keniscayaan untuk memastikan kemanfaatan status cagar biosfer dan kemudahan pelaksanaan tinjauan berkala.

Artikel lainnya

Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya Susun Rencana Kerja Tahun 2024

Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya pada bulan Juni lalu, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) menindaklanjutinya dengan pertemuan untuk berkoordinasi menyusun rencana strategis serta berbagi peran dan tanggung jawab diantara anggota Pokja. Kemudian ditanjutkan dengan rapat koordinasi pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang diadakan dalam rangka menyusun rencana kerja. Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, bapak George Yarangga, A.Pi., M.M., dan dihadiri, selain oleh anggota Pokja PPS, juga mitra pembangunan di provinsi tersebut.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, ST.,MSi., menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Sementara Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, Bapak Danang Kuncara Sakti, S.Hut., ME., mempresentasikan kebijakan pengembangan usaha untuk mendorong nilai ekonomi perhutanan sosial. Kemudian Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., memberi penjelasan mengenai skema perhutanan sosial.

Penyusunan rencana kerja disiapkan oleh masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan, Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, yang kemudian menghasilkan dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk kegiatan pada tahun 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
1. **Nita Yohana,** Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. **Mohammad Sidiq,** Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

FORCLIME Presentasikan Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan untuk Pengelolaan Hutan di Papua

Untuk mendorong pengelolaan hutan (khususnya aspek perencanaan) yang lebih baik pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, FORCLIME bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua melakukan *Training Needs Assessment* (TNA). Pelaksanaan TNA untuk mendukung kompetensi sumber daya manusia KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan pada September tahun lalu. Sedangkan TNA untuk bidang *Geographical Information Sistem* (GIS) bagi personel di DKLH dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua diselenggarakan secara daring pada bulan Agustus 2023.

Hasil kedua TNA tersebut dipresentasikan secara daring pada tanggal 7 November 2023, dan dihadiri oleh pejabat struktural dan staf yang menduduki jabatan atau diproyeksikan menduduki jabatan di bidang Perencanaan Hutan atau bagian Perpetaan di DKLH, termasuk KPH, dan BBKSDA Papua. Kegiatan ini dimoderasi oleh Edy Marbyanto, Manager bidang Pengembangan Kapasitas SDM FORCLIME.

Dalam pembukaan, Kepala Seksi Rencana Pembangunan Kehutanan DKLH Papua, bapak Ridwan Atmojo, ST., M.Si., menyampaikan bahwa dalam pengelolaan hutan, KPH menghadapi kendala karena keterbatasan SDM terutama terkait dengan GIS untuk mendukung proses penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP).

Hasil TNA terkait dengan kompetensi SDM KPH disampaikan oleh Muhammad Alif K. Sahide, selaku konsultan, dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Sedangkan hasil TNA terkait GIS dan Pemetaan dipresentasikan oleh Danan P. Hadi, Advisor GIS/ Remote Sensing dan e-Learning dari FORCLIME. Secara umum dalam diskusi ini disimpulkan bahwa: (1) Sebagian besar KPH di Papua memiliki keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana; (2) Upaya peningkatan kapasitas SDM KPH perlu difokuskan pada tema perencanaan seperti penyusunan RPHJP termasuk tata hutan, inventariasi hutan, inventarisasi sosial ekonomi, manajemen data; (3) Spesifikasi sarana kerja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan kerja. Untuk bidang perpetaan bisa menggunakan software open-source yang telah teruji; (4) Perlu pengembangan kerja sama lebih intensif antara DKLH Papua dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Papua dalam pengembangan kapasitas SDM.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, akan diselenggarakan diskusi untuk membahas rencana pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan berdasarkan rekomendasi hasil TNA.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
1. **Danan P. Hadi,** Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
2. **Edy Marbyanto,** Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

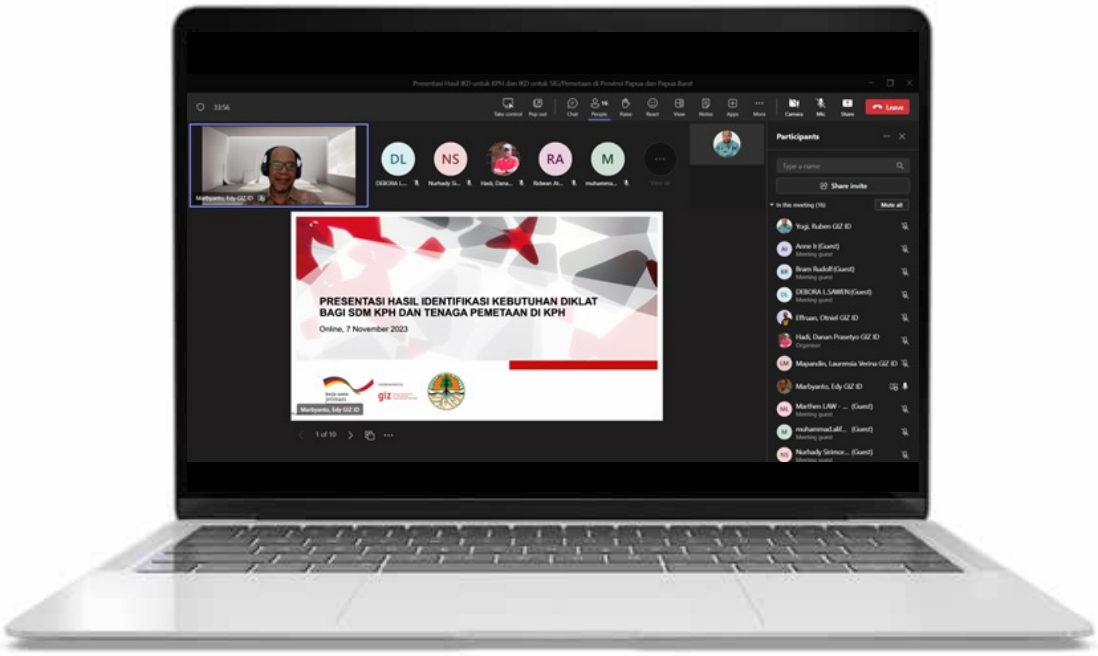

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Gedung Manggala Wanabakti , Blok 7 lantai 6
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de

kerja sama jerman DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Diimplementasikan oleh: giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gn
Bekerja sama dengan: